



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**UNIT KERJA** : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUNARNO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **754812**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. **2.216.500.000**

1. Tanah Seluas 765 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 3330 m2/450 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
3. Tanah Seluas 3636 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 158.000.000
4. Tanah Seluas 3194 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 131.000.000
5. Tanah Seluas 206 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 72.500.000
6. Tanah Seluas 1829 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 60.000.000
7. Tanah Seluas 3330 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000
8. Tanah Seluas 620 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 313.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. **84.800.000**

1. MOBIL, TOYOTA STARLED Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 29.800.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. **46.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	60.473.016
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.407.773.016
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.407.773.016

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.